



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN



Kemenkum Kalsel News

Buletin Edisi Pekan Ketiga Oktober



**Harmonisasi Raperbup
Tata Naskah Dinas Desa
HST**



**Perkuat Kreativitas
Musik Lokal Banua**



**Koordinasi Penguatan
Sistem TI di Pusdatin
Kemenkum**



**DIVISI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM**

DIVISI PELAYANAN HUKUM

BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Kunjungi situs kami



kalsel.kemenkum.go.id

Terhubung lebih dekat: YouTube **[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)**

13 Oktober 2025

SK Kepengurusan Diterima, Sekjen PSI Sebut Pelayanan Kemenkum Super Cepat



Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, telah mengesahkan surat keputusan (SK) tentang kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Supratman menyerahkan SK tersebut secara langsung kepada Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jumat (10/10/2025).

Supratman mengaku baru menerima disposisi surat permohonan kepengurusan PSI pada Kamis (09/10/2025) kemarin. Kemudian pada hari yang sama telah ia tanda tangani.

“Hari ini saya menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum menyangkut anggaran dasar, lambang partai, dan susunan kepengurusan pada Sekjen PSI. Saya baru menerima surat kemarin, dan hari ini sudah diserahkan,” ujar Supratman.

Supratman mengatakan kecepatan pelayanan Kemenkum merupakan bagian dari transformasi untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pemangku kepentingan, termasuk kepada partai politik.

Dalam momen ini, Sekjen PSI, Raja Juli mengungkapkan terima kasihnya kepada Menteri Hukum karena pelayanan yang dirasakan sangat cepat. Ia bilang Kemenkum dapat menjadi percontohan bagi kementerian lainnya.

“Kami merasa sangat dilayani dengan cepat. Bukan hanya cepat, tapi super cepat. Jadi kalau Pak Prabowo sering berjanji pelayanan publik yang baik, saya kira Kementerian Hukum adalah salah satu contoh yang baik di negeri ini,” ujarnya.

Raja Juli mengaku pihak PSI baru saja mengajukan permohonan kepengurusan dengan sistem online pada hari Kamis (09/10/2025). Lalu di hari yang sama sudah dihubungi untuk dapat menerima SK pada hari ini (Jumat).

“Kami baru memasukkan (permohonan) kemarin melalui sistem OSS online, malam hari sudah ditelpon, pagi hari ini kami sudah terima SK kepengurusan dan sebagainya,” ungkapnya.

Adapun percepatan pelayanan merupakan komitmen Kementerian Hukum untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat. Sejak awal tahun 2025, Kemenkum telah mencanangkan transformasi digital semua pelayanan publik. Melalui transformasi ini, seluruh pelayanan Kemenkum menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diakses dari mana saja.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyambut langkah cepat yang ditunjukkan Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kepada partai politik.

“Apa yang dilakukan oleh Bapak Menteri Hukum menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kementerian Hukum kini benar-benar bertransformasi menuju tata kelola yang cepat, transparan, dan berintegritas. Ini menjadi bukti nyata bahwa birokrasi bisa berjalan efisien tanpa mengorbankan akuntabilitas,” ujar Alex.

Ia menambahkan bahwa semangat pelayanan super cepat tersebut juga menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Kantor Wilayah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum di daerah, sehingga kehadiran Kemenkum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.



13 Oktober 2025

Apel Pagi Jadi Momentum Penguatan Disiplin dan Komitmen Kinerja di Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (13/10). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kanwil tersebut diikuti oleh seluruh pejabat struktural, pegawai, dan ASN, sebagai bentuk kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Apel pagi kali ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, dengan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana bertindak sebagai pembina apel.

Dalam amanatnya, Anton menekankan bahwa apel pagi merupakan salah satu bentuk kedisiplinan yang wajib dijaga oleh seluruh jajaran Kanwil. Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan program kerja di triwulan IV tahun 2025 agar seluruh target kinerja dapat direalisasikan dengan baik.

“Kita sudah memasuki bulan Oktober, yang berarti sisa waktu tahun ini harus dimanfaatkan dengan optimal untuk menyelesaikan seluruh program kerja yang telah direncanakan,” ujar Anton.

Lebih lanjut, Anton juga menyinggung hasil pelaksanaan penilaian menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Ia mengajak seluruh jajaran untuk tetap konsisten mempertahankan pelayanan prima yang menjadi ciri khas Kanwil Kemenkum Kalsel.

“Predikat WBK bukan hanya soal penilaian, tetapi cerminan budaya kerja yang berintegritas dan melayani dengan sepenuh hati. Peran serta seluruh pegawai sangat diperlukan untuk menjaga pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Apel ditutup dengan ajakan untuk terus memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama demi mewujudkan kinerja yang berkualitas, berintegritas, dan berdampak positif bagi masyarakat Kalimantan Selatan.



13 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Gelar Coffee Morning, Bahas Evaluasi Kinerja dan Rencana Kegiatan



Banjarmasin, Humas_Info – Pada Senin, 13 Oktober 2025, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, kembali memimpin kegiatan coffee morning bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Pertemuan santai yang berlangsung di Taman WBK, yang merupakan area terbuka kantor wilayah ini menjadi wadah konsolidasi internal untuk membahas evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2025, strategi peningkatan publikasi dan kemediaman, serta pencapaian hasil kerja dari masing-masing unit.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, para pejabat membahas berbagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja dan memperkuat peran kehumasan sebagai ujung tombak penyampaian informasi publik. Pembahasan juga menyoroti pentingnya pelaporan capaian kinerja yang akuntabel dan transparan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap Kemenkum.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk menjaga ritme kerja, memperkuat koordinasi, dan memastikan arah kebijakan Kanwil berjalan selaras dengan target nasional.

“Coffee morning ini bukan sekadar pertemuan santai, tetapi ruang refleksi dan konsolidasi untuk melihat sejauh mana capaian kinerja kita. Kemediaman dan publikasi juga menjadi aspek penting, karena keberhasilan kerja harus bisa diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Alex juga menekankan pentingnya menjaga komitmen bersama dalam mendorong pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat WBK/WBBM, serta memperkuat sinergi antar-divisi agar pelayanan publik di Kanwil Kemenkum Kalsel semakin optimal dan berdampak nyata.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta keselarasan visi, peningkatan kinerja berkelanjutan, dan penguatan komunikasi publik yang efektif sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.

13 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Bahas Harmonisasi Ranperbup HST tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Senin (13/10), bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan harmonisasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiah, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hadir Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, M. Rusdiyanto, bersama jajaran perangkat daerah terkait yang turut memberikan penjelasan substansi materi Ranperbup.

Rapat harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari permohonan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui surat nomor 188.342/951/KUM/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan tujuan untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pembentukan produk hukum daerah yang baik.

Dalam pembahasannya, tim perancang Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan masukan teknis dan penyesuaian norma terhadap struktur dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk menjamin keselarasan norma hukum, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat landasan hukum dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah.

“Harmonisasi bukan sekadar penyempurnaan redaksional, tetapi juga memastikan bahwa substansi yang diatur memiliki dasar hukum yang kuat, sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Anton.

Melalui proses harmonisasi ini, diharapkan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah dapat menjadi landasan hukum yang komprehensif dan akuntabel dalam penataan organisasi perangkat daerah, sejalan dengan kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi dan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan.



13 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Hasil Harmonisasi Ranperbup HST tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan secara resmi menyerahkan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Senin (13/10), bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Penyerahan hasil harmonisasi dilakukan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, M. Rusdiyanto, mewakili Pemkab HST. Turut hadir Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiah, beserta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel yang turut mengawal proses pembahasan dan penyelarasan substansi ranperbup tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Anton menyampaikan bahwa penyelesaian harmonisasi Ranperbup HST merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk menghadirkan produk hukum daerah yang selaras, terukur, dan sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan.

“Melalui hasil harmonisasi ini, kami memastikan bahwa setiap norma dan struktur kelembagaan yang diatur dalam Ranperbup telah sesuai dengan ketentuan hukum serta mendukung efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,” ujar Anton.

Ia menambahkan bahwa proses harmonisasi juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda HST, M. Rusdiyanto, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan masukan konstruktif dari tim perancang Kanwil Kemenkum Kalsel selama proses harmonisasi berlangsung.

“Masukan yang diberikan sangat membantu kami dalam menyempurnakan substansi Ranperbup agar lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

“Kami berkomitmen terus mendampingi pemerintah daerah dalam memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di daerah,” tegas Alex.

Dengan diserahkannya hasil harmonisasi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat segera menindaklanjuti proses penetapan peraturan bupati sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga pelaksanaan tata kelola kelembagaan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyampaikan harapan atas Rancangan Peraturan Bupati HST.

“Semoga bisa bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Pemerintah daerah dan pelayanan publik setempat menjadi lebih optimal,” ungkapnya.



13 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti FGD Pengumpulan Data Analisis Urgensi Kebijakan Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Hukum mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) secara daring pada Senin, 13 Oktober 2025.

Kegiatan FGD ini merupakan bagian dari tahapan Analisis Urgensi Kebijakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data dan masukan dari para pejabat fungsional di bidang Kekayaan Intelektual, khususnya terkait penyusunan standar kualitas hasil kerja serta pedoman penilaian kinerja jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menugaskan pejabat fungsional Analis Kekayaan Intelektual untuk menjadi informan dalam kegiatan tersebut, yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai Kantor Wilayah se-Indonesia.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud keselarasan dalam penetapan standar dan mekanisme penilaian kinerja bagi jabatan fungsional di bidang Kekayaan Intelektual, guna mendukung profesionalisme dan peningkatan kualitas layanan publik di sektor hukum.



13 Oktober 2025

Siap Jaga Konsistensi Opini WTP, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Senin (13/10).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas laporan keuangan dan memastikan tertib administrasi pengelolaan BMN di seluruh satuan kerja Kementerian Hukum. Kegiatan diikuti oleh seluruh unit utama, UPT, serta kantor wilayah di seluruh Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta pejabat dan staf pengelola keuangan dan BMN.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Sri Yusfina Yusuf menyampaikan apresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Kementerian Hukum dan HAM untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut. Beliau juga memberikan penghargaan atas terselesaikannya proses perekaman likuidasi pada aplikasi SAKTI bagi seluruh eks satuan kerja Kemenkumham.

“Rekonsiliasi dan pemutakhiran data akan dilaksanakan dalam dua tingkat, yaitu antara satuan kerja dengan kantor wilayah, serta antara satuan kerja pusat dengan unit eselon I. Seluruh proses ini merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk menjaga kualitas laporan keuangan kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Biro Keuangan menegaskan pentingnya komitmen, sinergi, dan kolaborasi lintas satuan kerja dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang andal, transparan, serta berkelanjutan guna mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap satuan kerja di wilayah Kalimantan Selatan memiliki data keuangan dan BMN yang sinkron, akurat, dan tertib administrasi.

“Rekonsiliasi bukan hanya sekadar formalitas pelaporan, tetapi juga bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Saya berharap seluruh pengelola keuangan dan BMN di lingkungan Kanwil terus berkomitmen pada transparansi dan integritas,” ujar Alex.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata dukungan terhadap upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kemenkum dapat terus menyelaraskan data keuangan dan BMN untuk mendukung penyusunan laporan keuangan tahunan yang kredibel dan transparan.



13 Oktober 2025

Wujudkan Akses Keadilan di Kalsel, Kanwil Kemenkum Kalsel Siapkan Diskusi Strategi Kebijakan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) tengah mematangkan persiapan pelaksanaan Diskusi Strategi Kebijakan bertema “Mewujudkan Akses Keadilan di Kalimantan Selatan Melalui Standar Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas.”

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober 2025 ini akan menjadi forum strategis untuk membahas implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, dengan fokus pada peningkatan kualitas, efektivitas, dan pemerataan layanan bantuan hukum di Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan regulasi bantuan hukum di daerah, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang memperkuat penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

“Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki dan memperkuat standar layanan bantuan hukum di Kalimantan Selatan, sekaligus memperluas partisipasi publik dalam upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Alex.

Lebih lanjut, Alex menegaskan pentingnya kesiapan teknis dan administratif dari seluruh jajaran agar kegiatan dapat berjalan optimal. Ia juga meminta agar setiap unsur pelaksana memastikan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, lembaga bantuan hukum, maupun akademisi.

Kegiatan ini akan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta Pemerintah Daerah. Adapun peserta yang direncanakan hadir meliputi perwakilan Kanwil Kemenkum seluruh Indonesia, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, paralegal se-Kalimantan Selatan, kepala desa/lurah, kalapas/rutan, mahasiswa, serta unsur akademisi.



Persiapan teknis, administratif, dan koordinasi dengan para narasumber kini tengah difinalisasi oleh Bidang Hukum bersama Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkum Kalsel. Sebagai penutup, Alex menegaskan komitmen Kementerian Hukum untuk terus berperan sebagai penggerak utama dalam memperluas akses keadilan di daerah.

“Kanwil Kemenkum Kalsel akan terus menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Akses keadilan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab kita bersama untuk terus diperjuangkan melalui pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan,” pungkasnya. Dengan kesiapan yang matang, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat pelaksanaan bantuan hukum yang tepat sasaran, berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat terhadap keadilan di Kalimantan Selatan.



13 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Dukung Bapperida Tabalong Tingkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual



Tabalong, KI_Info — Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong menyelenggarakan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual pada Kamis, 9 Oktober 2025 bertempat di Wisma Pendopo Bersinar, Kabupaten Tabalong.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, yakni M. Aji Rifani, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, yang menyampaikan materi mengenai kebijakan perlindungan KI, tata cara pendaftaran Merek dan Hak Cipta melalui sistem online DJKI, serta pentingnya pemanfaatan KI dalam pengembangan potensi produk unggulan daerah.

Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Bapperida Kabupaten Tabalong, Arianto, yang menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual sebagai bagian dari penguatan inovasi daerah.

Selanjutnya, Bupati Tabalong yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, Hamida Munawarah, turut memberikan sambutan dan menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam mendukung program pemerintah daerah.

Kegiatan diikuti oleh berbagai instansi, di antaranya Diskopukmperindag, Disporapar, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta unsur akademisi dan asosiasi kebudayaan serta dunia usaha di Kabupaten Tabalong.

Antusiasme peserta, terutama pelaku UMKM, terlihat dalam sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Banyak di antara mereka menyatakan ketertarikan untuk segera melakukan pendaftaran merek produk mereka melalui sistem daring DJKI.



Menanggapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Bapperida Kabupaten Tabalong yang proaktif dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Upaya seperti ini menjadi kunci dalam membangun kesadaran masyarakat, terutama pelaku UMKM, bahwa Kekayaan Intelektual bukan hanya perlindungan hukum, tetapi juga aset ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing daerah,” ujar Alex Cosmas Pinem.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat di Tabalong yang terdorong untuk mendaftarkan dan melindungi hasil cipta maupun produk unggulan mereka melalui sistem yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).



14 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Surat Catatan Ciptaan untuk Aransemen Lagu Pop “Karena Kamu” dan “Bersama Membangun Banua”



Banjarmasin, Info_Humas – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual masyarakat. Melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Kalsel melaksanakan kegiatan Penyerahan Surat Catatan Ciptaan atas dua karya aransemen musik pop berjudul “Karena Kamu” dan “Bersama Membangun Banua”, pada Senin (13/10) bertempat di Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel.

Karya aransemen tersebut diciptakan oleh H. M. Ari Budi bersama timnya dan telah resmi terdaftar sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi serta Tim Layanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kanwil Kemenkum Kalsel terus memberikan edukasi kepada para pencipta mengenai pentingnya pencatatan hak cipta sebagai langkah awal perlindungan hukum terhadap karyanya. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, serta menjadi dasar perlindungan terhadap potensi peniruan atau penyalahgunaan oleh pihak lain.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, menyampaikan bahwa penyerahan Surat Catatan Ciptaan ini bukan hanya bentuk pengakuan hukum, tetapi juga apresiasi atas kreativitas lokal yang berkontribusi dalam memperkaya khasanah budaya dan seni daerah.

“Kementerian Hukum melalui Kanwil Kalsel berkomitmen mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Karya seperti lagu, desain, atau tulisan memiliki nilai yang harus dijaga agar para pencipta merasa aman dan termotivasi untuk terus berkarya,” ungkapnya.

Selain sebagai bentuk perlindungan hukum, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi Kanwil Kemenkum Kalsel untuk terus memperluas edukasi tentang pentingnya pencatatan karya seni dan inovasi masyarakat. Diharapkan, semakin banyak pelaku seni dan kreator di Kalimantan Selatan yang sadar akan nilai ekonomis dan hukum dari karya cipta mereka.

Dengan adanya perlindungan hukum melalui Surat Catatan Ciptaan, para pencipta dapat lebih percaya diri untuk menampilkan karyanya secara luas, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem kreatif yang sehat di daerah.



14 Oktober 2025

Sosialisasi Pemberdayaan Ormas, Kemenkum Kalsel Tekankan Pentingnya Legalitas



Banjarbaru, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum turut berperan dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang digelar di Aula Lingkungan Intan DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (14/10/2025).

Acara dibuka oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru, Ahmad Syarif Izami, yang menekankan pentingnya komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut, Dewi Woro Lestari, S.H., M.H., selaku narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, menyampaikan materi mengenai pentingnya pendaftaran Ormas menjadi berbadan hukum, pedoman penggunaan nama organisasi, serta manfaat kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Sesi berikutnya menghadirkan AKP Indra Wahyu Wibowo, S.H., M.M., yang memaparkan tentang pengawasan dan pemberdayaan Ormas di Kota Banjarbaru. Ia menjelaskan strategi Polri dalam memperkuat sinergi bersama masyarakat serta pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menjaga stabilitas sosial.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab dan sharing session. Peserta aktif berdiskusi terkait mekanisme pendaftaran Ormas, legalitas organisasi, serta peran Ormas dalam mendukung ketertiban dan kehidupan sosial masyarakat.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.



“Kementerian Hukum berkomitmen mendukung pemberdayaan ormas melalui peningkatan pemahaman hukum dan fasilitasi pendaftaran badan hukum. Legalitas yang kuat bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi Ormas, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban dan memperkuat persatuan,” ujar Alex.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Ormas di Kota Banjarbaru semakin memahami pentingnya aspek legalitas dan berperan aktif dalam membangun kemitraan yang harmonis dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum.



14 Oktober 2025

Perkuat Sinergi Pembentukan Kebijakan Hukum, Kanwil Kemenkum Kalsel Kunjungi Biro Hukum Pemprov



Banjarbaru, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana beserta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan Tim Kerja Humas melakukan kunjungan koordinasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Guntur Ferry Fahrar beserta jajaran. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, salah satunya mengenai persiapan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan yang akan mengangkat tema Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Adapun pokok materi yang akan diangkat meliputi permasalahan implementasi, rekomendasi kebijakan, serta harapan terhadap penerapan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021, terutama dalam konteks peningkatan efektivitas layanan bantuan hukum di daerah.

Pada kesempatan ini juga dibahas mengenai pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Tim BSK Hukum dan Kanwil Kemenkum Kalsel mendorong dukungan dari Pemerintah Provinsi agar target 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh wilayah Kalsel dapat tercapai. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan pemerataan akses terhadap keadilan serta peningkatan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

“Kami menyambut baik koordinasi ini karena menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui sinergi seperti ini, diharapkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dapat semakin tepat sasaran dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Guntur Ferry Fahrar.



Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah penguatan kerja sama dalam pembentukan kebijakan hukum yang responsif dan adaptif.

“Koordinasi ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara Kementerian Hukum RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat sinergi kebijakan hukum yang berpihak pada masyarakat,” ujarnya.

Melalui kolaborasi berkelanjutan ini, diharapkan kualitas pembentukan kebijakan hukum di Kalimantan Selatan semakin meningkat dan selaras dengan arah program dan kebijakan nasional.



14 Oktober 2025

BSK Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel Lakukan Kunjungan ke Posbakumadin Banjarbaru



Banjarbaru, Humas_Info – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan ke Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima langsung oleh Ketua Posbakumadin Banjarbaru, Edi Gutama.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengambilan video dokumentasi yang akan digunakan sebagai bagian dari materi Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang digelar oleh Kanwil Kemenkum Kalsel. Dokumentasi tersebut merekam paparan mengenai kondisi riil layanan bantuan hukum di lapangan, termasuk dinamika pelaksanaan dan praktik pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di wilayah Banjarbaru.

Selain itu, Tim BSK Hukum juga memanfaatkan momentum kunjungan ini untuk menggali informasi terkait kendala, kebutuhan, dan harapan lembaga bantuan hukum di daerah dalam menjalankan tugasnya. Melalui interaksi langsung dengan pengurus Posbakumadin Banjarbaru, diperoleh berbagai masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan strategis di bidang layanan bantuan hukum.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari BSK Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan seperti ini penting untuk menyampaikan kondisi faktual di lapangan agar arah kebijakan ke depan benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Edi Gutama, Ketua Posbakumadin Banjarbaru.

Tim BSK Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan lembaga bantuan hukum di daerah, guna memastikan layanan bantuan hukum berjalan efektif, merata, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat pencari keadilan.

“Kunjungan ini kami lakukan untuk melihat langsung bagaimana pelaksanaan layanan bantuan hukum berjalan di lapangan. Dengan memahami kondisi nyata dan tantangan yang dihadapi lembaga bantuan hukum, kami dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Eldy Prasetya Setiawan, Ketua Tim BSK Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel.

14 Oktober 2025

BSK Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Buku Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kepada Biro Hukum Pemprov



Banjarbaru, Humas_Info – Dalam rangka memperkuat sinergi dan meningkatkan kapasitas pemahaman aparatur daerah terhadap proses pembentukan produk hukum, Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyerahkan buku terbitan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berjudul “Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat” dan “Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”.



Penyerahan dilakukan oleh Ketua Tim BSK Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Eldy Prasetya Setiawan, kepada perwakilan Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pembentukan peraturan di tingkat daerah.



Buku tersebut berisi kumpulan tanya jawab dan panduan praktis yang disusun oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai referensi tambahan bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dan menelaah rancangan peraturan daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi dan prinsip pembentukan peraturan yang baik.

Melalui penyerahan ini, diharapkan jajaran Biro Hukum Pemprov Kalsel dapat memanfaatkan buku tersebut sebagai bahan pembelajaran dan rujukan dalam setiap proses penyusunan kebijakan hukum di daerah.

“Buku ini kami serahkan sebagai wujud dukungan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kapasitas teknis jajaran hukum di daerah. Kami berharap referensi ini dapat membantu dalam memastikan kualitas pembentukan peraturan yang harmonis dan sesuai kaidah hukum nasional,” ujar Eldy Prasetya Setiawan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BSK Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam membangun kebijakan hukum yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.



14 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Hasil Harmonisasi Ranperbup HST tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Banjarbaru, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau progres pembangunan gedung baru Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel di Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Kantor, Eko Herdianto, bersama perwakilan pelaksana pembangunan konstruksi dan pengawas.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda monitoring rutin pembangunan, yang bertujuan memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil meninjau langsung kondisi lapangan, termasuk progres pengerjaan struktur bangunan, kesiapan material, serta penerapan standar keselamatan dan keamanan kerja di lokasi proyek.

“Pembangunan gedung baru ini merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana, transparan, dan akuntabel,” ujar Alex Cosmas Pinem, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Sementara itu, PPK Pembangunan Gedung Kantor, Eko Herdianto, menjelaskan bahwa hingga saat ini pekerjaan konstruksi berjalan dengan progres yang terus diawasi secara berkala oleh tim teknis dan pihak kontraktor.

“Kami terus melakukan pengawasan terhadap mutu pekerjaan dan memastikan semua tahapan sesuai dengan ketentuan. Koordinasi antara pelaksana, konsultan, dan pihak Kanwil berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Melalui monitoring rutin ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk memastikan pembangunan gedung baru dapat selesai tepat waktu dan menjadi fasilitas representatif bagi pelayanan hukum kepada masyarakat Kalimantan Selatan.



14 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Pembukaan Seminar Nasional Penguatan Ekosistem Inovasi Industri Pangan Melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut mengikuti pembukaan Seminar Nasional bertema “Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan Melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum pada Selasa (14/10).

Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman Jakarta ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan dihadiri oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, mengikuti kegiatan secara virtual didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, serta pejabat dan staf pelayanan KI.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam memperkuat daya saing ekonomi rakyat.

“Kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi merupakan langkah nyata dalam melindungi produk koperasi melalui pendaftaran merek kolektif. KI bukan hanya pelindung karya, tetapi juga menjadi solusi akses permodalan karena sertifikat dan surat pencatatan KI kini dapat dijadikan jaminan fidusia untuk pembiayaan usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum atas dukungan aktif dalam penguatan koperasi berbasis inovasi dan kekayaan intelektual.

“Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi sistem ekonomi rakyat dari hulu ke hilir yang memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi nasional,” ungkapnya.

Menanggapi kegiatan tersebut, secara terpisah Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem menyampaikan dukungannya terhadap langkah strategis DJKI dalam memperluas pemahaman perlindungan merek kolektif di daerah.

“Seminar nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kanwil Kemenkum Kalsel siap menindaklanjuti dengan pendampingan langsung bagi Koperasi Merah Putih di Kalimantan Selatan agar setiap produk lokal memiliki perlindungan hukum yang kuat,” ujar Alex.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Ekonomi Kreatif, Otoritas Jasa Keuangan, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dalam kegiatan turut Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan Melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Melalui pembukaan seminar ini, DJKI menegaskan komitmen dalam memperluas ekosistem inovasi dan perlindungan KI bagi koperasi di seluruh Indonesia. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha daerah.

Dari Kalimantan Selatan, Kanwil Kemenkum Kalsel menyatakan siap mendukung penuh program nasional ini dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran merek kolektif bagi koperasi di wilayah Kalimantan Selatan.



14 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Audiensi dengan Bupati Tanah Laut, Bahas Penguatan Akses Keadilan



Tanah Laut, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, melakukan audiensi dengan Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, dalam rangka memperkuat kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kemenkum di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Tanah Laut ini menjadi ajang strategis untuk membahas sinergi antara Kemenkum dan Pemerintah Kabupaten dalam memperluas akses bantuan hukum serta penguatan program Justice for All.

Dalam kesempatan tersebut, Alex Cosmas Pinem menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan layanan hukum benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke desa-desa.

“Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif. Kemenkum Kalsel ingin memastikan setiap warga, terutama yang kurang mampu, memiliki akses terhadap keadilan tanpa hambatan administratif maupun biaya,” ujar Alex Cosmas Pinem.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai langkah konkret memperkuat perlindungan hukum di daerah.

14 Oktober 2025

Bupati Tanah Laut Terima STR Posbankum dari Kemenkum Kalsel



Tanah Laut, Humas_Info — Dalam rangkaian kegiatan Peresmian Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Tanah Laut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyerahkan secara simbolis Tanda Bukti Register (STR) Pembentukan Posbankum kepada Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto.



Penyerahan STR ini menjadi tanda resmi terbentuknya Posbankum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang diharapkan menjadi pusat layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah tersebut.



Dalam sambutannya, Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa penyerahan STR bukan hanya formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Kementerian Hukum dalam memperluas jaringan layanan hukum yang terukur dan berkelanjutan.

“Posbankum adalah ujung tombak pelayanan hukum yang menjangkau langsung masyarakat di daerah. Kami berharap keberadaannya di Tanah Laut dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi contoh bagi kabupaten lain,” ujar Alex Cosmas Pinem.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin, seraya berharap agar keberadaan Posbankum dapat meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukumnya.



15 Oktober 2025

Perkuat Dasar Hukum Daerah, Kemenkum Kalsel Kawal Penyusunan Ranperda Barito Kuala



Barito Kuala, P3H_Info – Pada Selasa, 14 Oktober 2025, Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pengumpulan data penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Barito Kuala di kantor DPRD Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah, M. Rezki Kusuma, ini diikuti oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Pengumpulan data tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif.

Dalam pelaksanaannya, Tim Kanwil Kemenkum Kalsel disambut dengan baik oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, yang turut memberikan dukungan terhadap proses penyusunan Ranperda. Kegiatan dimulai dengan penyampaian kuesioner tertulis yang berisi beberapa poin penting, antara lain terkait ketersediaan infrastruktur pasif, instrumen hukum, kewenangan pemerintah daerah, kendala penataan dan pengendalian, koordinasi antar perangkat daerah, serta berbagai usulan dan masukan terkait materi pengaturan.

Data yang dikumpulkan akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda agar memiliki dasar empiris yang kuat dan relevan dengan kondisi faktual di daerah. Diharapkan, hasil kajian ini dapat mendukung terwujudnya regulasi yang efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ketua Tim, M. Rezki Kusuma, menyampaikan bahwa proses pengumpulan data ini merupakan tahapan penting untuk memastikan substansi peraturan daerah nantinya benar-benar berbasis pada kebutuhan dan realitas di lapangan.

“Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda harus berangkat dari data yang akurat. Melalui pengumpulan data langsung ke DPRD, kami ingin memastikan setiap pasal dan norma yang dirumuskan memiliki dasar faktual dan bermanfaat bagi masyarakat Barito Kuala,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya dalam mendukung DPRD dan Pemerintah Daerah dalam membentuk produk hukum daerah yang berkualitas, aplikatif, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



15 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Turun ke Kominfo Batola, Kumpulkan Data Pendukung Penyusunan Ranperda Infrastruktur Pasif



Barito Kuala, P3H_Info – Pada Selasa, 14 Oktober 2025, Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan secara estafet melaksanakan pengumpulan data penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja, M. Rezki Kusuma, ini diikuti oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Tim diterima dengan hangat oleh Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala beserta jajaran. Pertemuan dimulai dengan penyampaian kuesioner tertulis yang berisi sejumlah pertanyaan terkait kondisi dan tata kelola infrastruktur pasif di daerah, meliputi aspek hukum, kewenangan, kendala teknis, serta usulan penguatan regulasi.

Dalam diskusi yang berlangsung, terungkap bahwa wilayah Kabupaten Barito Kuala telah memiliki berbagai bentuk infrastruktur pasif seperti menara telekomunikasi, tiang bersama, dan jaringan kabel udara, namun belum terdapat sistem kabel bawah tanah. Penataan infrastruktur yang ada dinilai masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal keselamatan dan estetika kota. Selain itu, pembangunan menara telekomunikasi oleh berbagai operator kerap dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga menimbulkan ketidakteraturan dan potensi gangguan lingkungan.

Pihak Dinas Kominfo juga menyampaikan bahwa saat ini belum terdapat peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang secara rinci mengatur penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam penegakan aturan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau penyedia jaringan. Sementara itu, data inventarisasi menara dan jaringan kabel masih belum terintegrasi secara penuh dan jarang diperbarui, sehingga menyulitkan dalam proses pengawasan dan penataan.

Ketua Tim, M. Rezki Kusuma, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan sambutan baik dari Dinas Kominfo Barito Kuala. Ia menegaskan bahwa pengumpulan data ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis pada fakta lapangan.

“Data yang kami peroleh hari ini akan menjadi fondasi dalam merumuskan Naskah Akademik dan Ranperda. Kami ingin memastikan setiap rumusan norma dalam peraturan nantinya mampu menjawab kebutuhan daerah dan memperkuat tata kelola infrastruktur yang tertib serta berkeadilan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmen untuk terus mendukung DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.



15 Oktober 2025

Pengumpulan Data Pendukung Ranperda Penataan Infrastruktur Pasif Berlanjut, Tim Kemenkum Kalsel Sambangi BPKAD Barito Kuala



Barito Kuala, P3H_Info – Pada Selasa, 14 Oktober 2025, Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus melaksanakan pengumpulan data penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif, salah satunya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Kerja, M. Rezki Kusuma, bersama para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel, dan disambut langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala beserta Kepala Bidang Aset Daerah. Pertemuan berlangsung dalam suasana produktif dan penuh kolaborasi.

Pengumpulan data dimulai dengan penyampaian kuesioner tertulis mengenai kondisi dan pengelolaan infrastruktur pasif di daerah. Beberapa aspek yang dikaji meliputi ketersediaan infrastruktur, instrumen hukum yang berlaku, kewenangan pemerintah daerah, kendala teknis di lapangan, koordinasi antar perangkat daerah, serta usulan penguatan substansi pengaturan dalam Ranperda.

Dalam diskusi, pihak BPKAD menyampaikan berbagai masukan dan pandangan penting terkait penataan dan pengendalian infrastruktur pasif. Di antaranya, pernah terdapat usulan dari pihak swasta terkait pemasangan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Handil Bakti, serta perlunya perhatian terhadap mekanisme sewa dan pemanfaatan lahan untuk mendukung pendapatan daerah. Pemerintah daerah melalui BPKAD juga berencana untuk menyediakan properti investasi sebagai upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, dibahas pula mengenai perlunya penataan kabel listrik dan jalinan udara yang semrawut, sebagai bagian dari perwujudan tata ruang kota yang lebih tertib dan estetik.



Ketua Tim, M. Rezki Kusuma, menyampaikan apresiasi atas sambutan baik dari jajaran BPKAD Kabupaten Barito Kuala. Ia menegaskan bahwa hasil pengumpulan data ini menjadi langkah penting dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda agar pengaturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata daerah.

“Masukan dari BPKAD sangat berharga bagi kami dalam memperkuat landasan empiris dan teknis Ranperda. Data yang akurat akan memastikan regulasi yang disusun benar-benar aplikatif, efisien, dan berdampak bagi pengelolaan aset serta infrastruktur daerah,” ujar Rezki.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmen untuk terus mendukung DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, sinkron dengan kebijakan nasional, serta mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.



15 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel dan Dinas PUPR Lakukan Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda di Kabupaten Barito Kuala



Barito Kuala, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Barito Kuala pada Selasa, 14 Oktober 2025 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah, M. Rezki Kusuma, bersama Para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Kedatangan tim disambut hangat oleh Ibu Susanti dari Bagian Pengadministrasian Umum Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala.

Dalam kesempatan tersebut, tim Kanwil Kemenkum Kalsel menyerahkan kuesioner tertulis terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Ibu Susanti menjelaskan bahwa urusan terkait infrastruktur pasif di Dinas PUPR Barito Kuala ditangani oleh tiga bidang, yaitu Bidang Tata Ruang, Bidang Sumber Daya Air, dan Bidang Bina Marga.

Usai proses pengumpulan data, tim Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan baik serta kerja sama dari Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala dalam mendukung kelancaran kegiatan ini.

Ketua Tim Kerja, M. Rezki Kusuma, menyampaikan bahwa data yang diperoleh akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala.

“Kami mengapresiasi dukungan dari Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Hal ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan Ranperda yang disusun memiliki dasar empiris dan substansi yang kuat,” ujar Rezki.



Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, secara terpisah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memberikan fasilitasi pembentukan regulasi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan daerah.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap proses pembentukan regulasi di daerah dapat berjalan dengan baik, sesuai prinsip keterbukaan, partisipasi, dan berbasis data yang valid,” tutur Alex.

Kegiatan berlangsung lancar hingga selesai dengan semangat kolaboratif antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.



15 Oktober 2025

Tim Kanwil Kemenkum Kalsel Lakukan Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda di Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Kuala



Barito Kuala, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Barito Kuala pada Selasa, 14 Oktober 2025 bertempat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan ini dipimpin oleh M. Rezki Kusuma, Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah, bersama Para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Kedatangan tim disambut dengan hangat oleh dua orang staf dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Kuala.

Dalam kegiatan tersebut, tim Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan kuesioner tertulis yang memuat sejumlah pertanyaan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif. Data yang diminta meliputi ketersediaan infrastruktur pasif, instrumen hukum yang ada, kewenangan Pemerintah Daerah, kendala dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif, koordinasi antar perangkat daerah, serta usulan yang berkaitan dengan substansi Ranperda.

Selain itu, pihak Bagian Hukum Setda Barito Kuala juga menyerahkan telaahan dari instansi terkait yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengendalian infrastruktur pasif di wilayah tersebut.

Ketua Tim Kerja, M. Rezki Kusuma, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan keterbukaan dari Bagian Hukum Setda Barito Kuala dalam mendukung kegiatan pengumpulan data ini.

“Kami berterima kasih atas sambutan yang baik serta dukungan Bagian Hukum Setda Barito Kuala dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Data yang kami himpun ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Barito Kuala,” ujar Rezki.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata peran Kemenkum Kalsel dalam memberikan fasilitasi pembentukan regulasi yang berkualitas dan berbasis data di daerah.

“Kami terus berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang tepat sasaran dan memiliki landasan akademik yang kuat, sehingga implementasinya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Alex.

Kegiatan berlangsung lancar dan produktif, menandai komitmen bersama antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mewujudkan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan tata kelola infrastruktur daerah.

15 Oktober 2025

Kemenkum Kalsel Kumpulkan Data Lapangan Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda di Kabupaten Barito Kuala, Hasilkan Temuan Ini



Barito Kuala, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data Lapangan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Barito Kuala pada Selasa, 14 Oktober 2025, bertempat di beberapa titik wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan dipimpin oleh M. Rezki Kusuma selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah, didampingi Para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi infrastruktur pasif serta wawancara dengan masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Barito Kuala.

Dari hasil pengamatan, tim memperoleh sejumlah temuan penting di lapangan. Antara lain, belum adanya kabel bawah tanah, pemeliharaan kabel yang tidak dilakukan secara berkala, serta banyaknya kabel yang melintang sembarangan di tiang listrik, pepohonan, dan bangunan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu keamanan, estetika, dan keselamatan lingkungan sekitar.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi dan masukan terkait pembangunan infrastruktur pasif di wilayah mereka. Beberapa di antaranya menyoroti adanya penolakan terhadap pembangunan menara telekomunikasi di area permukiman karena dianggap mengganggu kenyamanan dan menimbulkan kekhawatiran akan bahaya lingkungan.

Masyarakat mengusulkan perlunya tim koordinasi penataan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan saluran kabel bawah tanah, serta penertiban kabel udara yang tidak terpakai atau melanggar jalur. Mereka juga berharap adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya infrastruktur pasif telekomunikasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan di sekitar area menara kabel.

Ketua Tim Kerja, M. Rezki Kusuma, menyampaikan bahwa data yang dihimpun dari lapangan ini menjadi elemen penting dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat.

“Masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dengan turun langsung ke lapangan, kami bisa memastikan bahwa Ranperda yang disusun benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan menjawab persoalan aktual di daerah,” ujar Rezki.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, mengapresiasi langkah tim yang aktif melakukan pendekatan partisipatif dalam proses penyusunan regulasi daerah.

“Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk memastikan setiap produk hukum daerah lahir dari proses yang inklusif, transparan, dan berbasis data lapangan. Ini adalah wujud nyata hadirnya hukum yang berpihak pada masyarakat,” tegas Alex.

Kegiatan berjalan lancar dan produktif, menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung penyusunan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi faktual di lapangan.



15 Oktober 2025

BPIP Lakukan Audiensi Bersama Kemenkum Kalsel Bahas Penguatan Nilai Pancasila dalam Regulasi Daerah



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menerima kunjungan kerja dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Rabu, 15 Oktober 2025, bertempat di ruang Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel. Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah.



Dari pihak BPIP, hadir Analis Hukum Ahli Madya, Jackson Simamora, dan Analis Kebijakan Ahli Madya, Thomas Suseno, beserta jajaran dari Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi. Audiensi ini membahas penguatan kerja sama antara BPIP dan Kemenkum Kalsel dalam memastikan setiap produk hukum daerah berlandaskan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman.



Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembentukan peraturan daerah.

“Pancasila harus menjadi ruh di balik setiap kebijakan hukum. Melalui kolaborasi dengan BPIP, kami ingin memastikan setiap regulasi daerah tidak hanya patuh secara yuridis, tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi kelembagaan antara Kemenkum Kalsel dan BPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila di bidang hukum, sekaligus memperdalam kolaborasi lintas instansi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.



15 Oktober 2025

Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti FGD Pengumpulan Data Analisis Urgensi Kebijakan Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berpartisipasi dalam kegiatan Pemutakhiran Data dan Saldo Rekening Pemerintah Triwulan III Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara hybrid, Rabu (15/10).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tertib administrasi dan akurasi data rekening pemerintah, meliputi rekening bendahara pengeluaran, rekening bendahara penerimaan, serta rekening lainnya di setiap satuan kerja.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa kegiatan ini penting dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum.

“Melalui pemutakhiran data ini, kita memastikan bahwa seluruh saldo rekening yang dikelola satuan kerja telah tercatat dengan benar, sehingga mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Alex.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel siap berkoordinasi dengan Biro Keuangan dalam penyampaian data rekening serta melakukan pembaharuan saldo per 31 Juli, 31 Agustus, dan 30 September 2025 sesuai ketentuan.

Kegiatan yang dihadiri secara daring melalui Zoom Meeting ini juga diikuti oleh Biro Keuangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di wilayah Kalimantan termasuk Kanwil Kemenkum Kalsel.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh data rekening pemerintah di lingkungan Kemenkum dapat dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance).



15 Oktober 2025

BPIP dan Kemenkum Kalsel Tinjau Perda Ramadhan Kota Banjarmasin



Banjarmasin, Humas_Info – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Koordinasi Pemantauan dan Peninjauan Rekomendasi Hasil Kajian terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan, pada Rabu (15/10), bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Banjarmasin.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah.

Dari pihak BPIP, hadir Analis Hukum Ahli Madya, Jackson Simamora, dan Analis Kebijakan Ahli Madya, Thomas Suseno, beserta jajaran Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi.

Kegiatan ini bertujuan meninjau kembali hasil kajian BPIP terhadap Perda Ramadhan Kota Banjarmasin untuk memastikan regulasi tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat. Melalui forum ini, BPIP dan Kemenkum Kalsel juga mendiskusikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil kajian sebelumnya yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, menegaskan bahwa Kemenkum Kalsel siap mendukung BPIP dalam memastikan setiap peraturan daerah tetap berpijak pada nilai-nilai ideologis bangsa.



“Regulasi daerah bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga cerminan nilai Pancasila yang hidup di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita memastikan bahwa setiap kebijakan daerah menumbuhkan harmoni sosial dan menghargai keberagaman umat beragama,” ujar Alex.

Kegiatan ini mempertegas sinergi antara BPIP dan Kemenkum Kalsel dalam mengawal pembinaan ideologi Pancasila di bidang hukum, sekaligus memastikan peraturan daerah di Kalimantan Selatan berjalan seiring dengan semangat kebangsaan dan keadilan sosial.



15 Oktober 2025

Sinergi Penegakan Hukum: Kanwil Kemenkum Kalsel Jalin Kerja Sama dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info - Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Penyidikan serta Peningkatan Kapasitas bersama Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan pada Selasa (7/10/2025) bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel.

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kalsel, Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Kemenkum Kalsel. Hadir pula Aiptu Yusuf Firdaus, S.H. (Bamin I Sie Korwas Ditreskrimsus Polda Kalsel) dan Aipda Samuel Pong A., S.H. (Bamin II Sie Korwas Ditreskrimsus Polda Kalsel) beserta jajaran.

Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyidikan oleh PPNS di lingkungan Kementerian Hukum serta memperkuat sinergi antarpenegak hukum di daerah. Melalui forum ini, kedua instansi membahas berbagai isu teknis terkait pelaksanaan penyidikan, kendala di lapangan, serta strategi peningkatan kapasitas PPNS agar pelaksanaan tugas penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Agenda kegiatan meliputi diskusi interaktif, paparan mengenai mekanisme koordinasi dan supervisi penyidikan, serta pembahasan bentuk kerja sama teknis dalam peningkatan kapasitas dan pertukaran informasi penegakan hukum. Selain itu, disepakati pula pentingnya pelaksanaan koordinasi berkala sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergitas antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Ditreskrimsus Polda Kalsel. Melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme PPNS, diharapkan penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan berintegritas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

15 Oktober 2025

Menuju Kinerja Berintegritas: Kemenkum Kalsel Ikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Rabu (15/10). Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Ruang Rapat Soepomo Lantai 7 Gedung Sekretariat Jenderal Jakarta dan diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah di Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dan dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Unit Utama, Kepala Biro, Sekretaris Unit Utama, serta jajaran pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dari Kanwil Kemenkum Kalsel, kegiatan diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah serta Tim Kerja Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Laporan.

Rapat ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja triwulan III Tahun 2025, mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, serta merumuskan langkah-langkah percepatan realisasi anggaran dan capaian kinerja pada triwulan IV.

Dalam arahnya, Sekretaris Jenderal Nico Afinta menegaskan pentingnya menjaga ritme kerja yang konsisten dan kolaboratif di seluruh jajaran Kementerian Hukum.

“Kita harus memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit, menegakkan nilai integritas dan profesionalitas, serta memastikan bahwa orientasi kinerja kita berfokus pada hasil dan dampak yang nyata bagi masyarakat,” ujar Nico.

Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.

“Bangun budaya kerja yang kolaboratif dan adaptif, pastikan akuntabilitas tetap terjaga, serta tingkatkan kecepatan dan ketepatan dalam setiap tindak lanjut. Semua ini merupakan komitmen kita bersama untuk kinerja Kementerian Hukum yang lebih baik,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyatakan bahwa Kanwil Kalsel siap menindaklanjuti hasil evaluasi dan arahan Sekjen dengan langkah konkret di tingkat wilayah.

“Kami akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas divisi, memastikan konsistensi pelaksanaan program, serta menjaga akuntabilitas dan kinerja yang berdampak langsung pada masyarakat Kalimantan Selatan,” ungkap Alex.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum, termasuk Kanwil Kemenkum Kalsel, dapat terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat tata kelola, serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

16 Oktober 2025

Harmonisasi Raperbup Tata Naskah Dinas Desa, Wujudkan Tertib Administrasi di Hulu Sungai Tengah



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa, pada Kamis (16/10/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah.

Kegiatan harmonisasi ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, perwakilan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah.

Kakanwil, Alex Cosmas Pinem dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan harmonisasi dilakukan untuk memastikan keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya di lapangan.

“Harmonisasi ini merupakan langkah penting untuk menyelaraskan substansi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang jelas,” ujar Kakanwil. Kakanwil juga menekankan pentingnya proses konsultasi internal di tingkat pemerintah daerah sebelum pelaksanaan harmonisasi.

“Sebelum diharmonisasikan, diharapkan pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan forum diskusi atau FGD dengan perangkat daerah terkait, sehingga naskah rancangan yang dibawa ke tahap harmonisasi telah matang dari sisi substansi maupun teknis penyusunan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kakanwil berharap agar hasil harmonisasi ini dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan implementatif.

“Kami berharap rancangan ini nantinya dapat menjadi pedoman yang aplikatif di lingkungan Pemerintah Desa, sehingga tertib administrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat semakin meningkat,” pungkasnya.

Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa ini disusun sebagai pedoman tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Substansinya antara lain mengatur jenis dan bentuk naskah dinas, tata cara penomoran, penggunaan media kertas atau elektronik, kewenangan penandatanganan, hingga pengamanan dan klasifikasi arsip.



16 Oktober 2025

Wujudkan Pelayanan Hukum Berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Kalsel Lantik Notaris Pengganti



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, secara resmi melantik dan mengambil sumpah Khoiril Latifah, S.Hi. sebagai Notaris Pengganti di wilayah Kota Banjarmasin. Pelantikan ini dilakukan mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari pengajuan cuti oleh Ina Marsina, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di wilayah Kota Banjarmasin, yang mengajukan izin cuti mulai 3 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Sebagai bentuk keberlanjutan pelayanan hukum kepada masyarakat, ditunjuklah Khoiril Latifah, S.Hi. sebagai Notaris Pengganti selama masa cuti berlangsung.

Dalam sambutannya, Meidy Firmansyah menegaskan bahwa pelantikan Notaris Pengganti bukan sekadar seremoni formal, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlangsungan pelayanan hukum bagi masyarakat.

“Notaris Pengganti memiliki kedudukan, hak, kewenangan, serta tanggung jawab hukum yang sama dengan notaris definitif. Karena itu, profesionalisme, ketelitian, dan kehati-hatian menjadi hal yang mutlak dalam menjalankan tugas,” tegas Meidy.

Ia juga berpesan agar Notaris Pengganti senantiasa menjunjung tinggi integritas, etika profesi, serta menjalankan kewajiban dalam pengisian dan pelaporan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bentuk akuntabilitas dan pengawasan profesi.



“Selamat kepada Saudari Khoiril Latifah, S.Hi. atas pelantikan ini. Jadikan amanah ini sebagai kesempatan untuk menegakkan nilai-nilai hukum, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris,” tutup Meidy Firmansyah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat struktural di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, perwakilan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banjarmasin, Rohaniwan yang dan para saksi.



16 Oktober 2025

Dukung Transformasi Digital, Kanwil Kemenkum Kalsel Koordinasi Penguatan Sistem TI di Pusdatin Kemenkum



Jakarta, Humas_Info — Dalam upaya memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan melakukan koordinasi strategis dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kemenkum, Kamis (16/10).

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Pusdatin, Rifqi Adrian Kriswanto. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal penting untuk Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, di antaranya optimalisasi kualitas jaringan internet di Kanwil Kalsel, rencana pemindahan jaringan ke gedung baru di Banjarbaru, serta pengelolaan pejabat fungsional pranata komputer dan pemanfaatan aplikasi serta hosting server yang dikelola Pusdatin.

“Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan sistem teknologi informasi di Kanwil siap mendukung pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis digital. Dukungan Pusdatin sangat penting agar integrasi sistem di pusat dan daerah berjalan selaras,” jelas Rustam Sakka, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalsel.



Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, secara terpisah menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur digital sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan dukungan Pusdatin, kami optimistis layanan hukum di Kalimantan Selatan akan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Koordinasi ini menjadi momentum penting dalam mempercepat implementasi layanan berbasis digital di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel, sejalan dengan semangat Digital Government Transformation yang digagas oleh Kemenkum RI.



16 Oktober 2025

Dorong Tata Kelola Efisien, Kanwil Kemenkum Kalsel Lakukan Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa ke Biro BMN dan Biro Keuangan



Jakarta, Humas_Info — Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta tata kelola keuangan yang transparan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, melaksanakan koordinasi dengan Biro Barang Milik Negara (BMN) dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkum di Jakarta, Kamis (16/10).

Kegiatan koordinasi ini membahas sejumlah isu strategis, antara lain optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kanwil, pencatatan e-kontrak pada aplikasi SPSE, serta keberadaan SDM pejabat pengadaan di daerah.

Selain itu, pembahasan dengan Biro Keuangan turut menyoroti langkah-langkah penyesuaian likuidasi aset seiring dengan dinamika organisasi Kemenkumham yang terus berkembang dan menyesuaikan struktur kelembagaan baru.

“Kami ingin memastikan seluruh proses pengadaan di wilayah berjalan akuntabel dan sesuai regulasi, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pusat agar pelaksanaan kegiatan di daerah lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar Rustam Sakka, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalsel.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyambut baik langkah koordinatif tersebut.

“Koordinasi langsung dengan Biro BMN dan Biro Keuangan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil. Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat,” ungkapnya.

Dengan terlaksananya koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam seluruh proses administrasi dan pengelolaan sumber daya, selaras dengan prinsip Reformasi Birokrasi Berintegritas.



17 Oktober 2025

Kolaborasi AKRAB Kanwil Kemenkum Kalsel dan Kanwil HAM Peringati Hari Bakti HAM di SMAN 2 Banjarmasin



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam semangat AKRAB (Aksi Kemenkum Kalsel Bagawi), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar kegiatan edukatif dalam rangka memperingati Hari Bakti HAM di SMAN 2 Banjarmasin.



Kegiatan yang diikuti siswa-siswi SMAN 2 Banjarmasin ini berlangsung interaktif dan penuh semangat kebersamaan. Kepala Kantor Wilayah HAM, Karyadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai saling menghargai hak asasi manusia sejak dini. “Sekolah adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan kesadaran menghormati martabat setiap individu,” ujarnya.



Dalam kegiatan ini, Dianor, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Kalsel, tampil sebagai narasumber dengan materi seputar ruang lingkup HAM yang luas, meliputi pengertian HAM, isu bullying, dan pelecehan seksual. Ia juga memperkenalkan berbagai layanan yang tersedia di Kemenkum Kalsel, seperti literasi hukum, pendampingan hukum, dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Melalui kegiatan AKRAB ini, peserta didik diajak memahami pentingnya menghormati hak sesama serta mengenal empat layanan hukum utama yang dapat diakses masyarakat. Interaksi aktif antara siswa dan narasumber menjadikan kegiatan semakin hidup dan bermakna.



Kolaborasi ini menjadi wujud nyata semangat AKRAB Kemenkum Kalsel dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda, demi terciptanya budaya yang sadar dan peduli terhadap hak asasi manusia.



PENGAYOMAN

**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

bangga
melayani
bangsa



Terhubung lebih dekat:  YouTube    [kemendiknas](https://www.kemendiknas.go.id)